



Laporan KEUANGAN Audited

BRMP BANTEN

Bagian Anggaran 018.09.2900

**Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2025**



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
Jl. Raya Ciptayasa KM.01 Ciruas, Serang – Banten
(0254) 281055 fax (0254) 282507

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iv
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	14
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	14
B.2. Belanja.....	15
B.3. Belanja Pegawai.....	16
B.4. Belanja Barang.....	17
B.5. Belanja Modal.....	17
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	19
C.1. Aset Lancar.....	19
C.1.1. Persediaan.....	19
C.2. Aset Tetap.....	19
C.2.1. Tanah.....	19
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	19
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	20
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	21
C.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	21
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	21
C.3. Aset Lainnya.....	22
C.3.1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya.....	22
C.3.2. Aset Lain-Lain.....	22
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	22
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	23
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga.....	23
C.5. Ekuitas.....	23
C.5.1. Ekuitas.....	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	24
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	24
D.2. Beban Pegawai.....	24
D.3. Beban Persediaan.....	25

D.4. Beban Barang dan Jasa.....	26
D.5. Beban Pemeliharaan.....	27
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	27
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.....	27
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	28
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
E.1. Ekuitas Awal.....	29
E.2. Surplus/Defisit-LO.....	29
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	29
E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan.....	30
E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	30
E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	30
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	30
E.4.1. Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	30
E.5. Ekuitas Akhir.....	31
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	32
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	32
F.2. Pengungkapan Lain Lain.....	32

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Suharva, S.P., M.P
NIP. 197106131998031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.622,181,100 atau mencapai 222.94% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 279,085,000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp.8,526,902,505 atau mencapai 96.17% dari alokasi anggaran sebesar Rp.8,866,288,000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 28,770,883,909 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.602,485,500 Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 28,116,583,072, Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.51,815,337,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.45,199,040 dan Rp.28,725,664,869.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.622,181,100 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 9,833,017,497 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp.-9,210,836,397,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0.00, Surplus Rp.-8,023,017,607 dan Defisit Rp.0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.-8,023,017,607,-

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.28,726,341,871 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.-8,023,017,607 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.7,909,833,605 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.28,725,684,869.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	279,085,000	622,181,100	222.94	546,713,746
Jumlah Pendapatan		279,085,000	622,181,100	222.94	546,713,746
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3,555,370,000	3,554,559,480	99.98	2,994,139,450
Belanja Barang	B.4.	5,030,434,000	4,692,445,485	93.28	5,072,252,874
Belanja Modal	B.5.	280,484,000	279,897,540	99.79	36,000,000
Jumlah Belanja		8,866,288,000	8,526,902,505	96.17	8,102,392,324

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	602,485,500	336,897,000
Jumlah Aset Lancar		602,485,500	336,897,000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	15,124,896,000	15,124,896,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	11,104,274,766	10,824,377,226
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	15,475,031,427	15,475,031,427
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	758,963,330	758,963,330
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	55,000,000	55,000,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(14,401,582,451)	(13,857,093,483)
Jumlah Aset Tetap		28,116,583,072	28,381,174,500
Aset Lainnya			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.1.	45,199,040	0
Aset Lain-lain	C.3.2.	31,900,000	31,900,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(25,283,703)	(23,629,629)
Jumlah Aset Lainnya		51,815,337	8,270,371
Jumlah Aset		28,770,883,909	28,726,341,871
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada pihak ketiga	C.4.1	45,199,040	0
Jumlah Kewajiban		45,199,040	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.4.2	28,725,684,869	28,726,341,871
Jumlah Ekuitas		28,725,684,869	28,726,341,871
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		28,770,883,909	28,726,341,871

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	622,181,100	387,113,000
JUMLAH PENDAPATAN		622,181,100	387,113,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3,554,559,480	2,994,139,450
Beban Persediaan	D.3.	418,712,540	36,008,600
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,639,833,060	3,420,959,822
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,219,681,604	924,886,292
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	402,133,781	690,376,160
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.7.	1,040,316,490	196,479,325
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	259,379,237	589,720,324
JUMLAH BEBAN		9,534,616,192	8,852,569,973
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		8,912,435,092	8,465,456,973
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0	6,851,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	1,502,041,500	666,359,146
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	0	25,297,400
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,208,179,790	647,912,746
SURPLUS/DEFISIT - LO		7,704,255,302	7,817,544,227

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	28,726,341,871	28,943,165,195
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(7,704,255,302)	(7,817,544,227)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	112,527,000	35,074,825
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7,909,833,605	7,565,646,078
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	318,105,303	-216,823,324
EKUITAS AKHIR	E.6.	29,044,447,174	28,726,341,871

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembagasesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jl. Raya Ciptayasa KM 01 Ciruas – Serang, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	279,085,000	279,085,000
Jumlah Pendapatan	279,085,000	279,085,000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,090,931,000	2,978,202,000
Belanja Lembur	156,778,000	187,402,000
Belanja Barang Operasional	1,295,004,000	1,191,968,000
Belanja Barang Non Operasional	278,495,000	1,044,624,000
Belanja Barang Persediaan	22,625,000	431,109,000
Belanja Jasa	382,845,000	405,664,000
Belanja Pemeliharaan	865,741,000	1,219,929,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	141,000,000	737,140,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	280,484,000
Jumlah Belanja	6,233,419,000	8,866,288,000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.622,181,100 atau mencapai 222,94% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.279,085,000 Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	275,571,000	616,756,100	223.81
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3,514,000	5,425,000	154.38
Jumlah	279,085,000	622,181,100	222.94

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,13% dibandingkan TA 2024. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	387,517,000	-
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	5,425,000	6,447,000	-18,84
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	0	89,346,410	-
Pendapatan Lain-Lain	0	63,403,336	-
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	616,756,100	0	-
Jumlah	622,181,100	546,713,746	12,13

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp.8,528,012,655 atau 96,17% dari anggaran belanja sebesar Rp.8,866,288,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2025

Uraian	2025		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3,555,370,000	3,554,559,480	0,02
Belanja Barang	5,030,434,000	4,692,445,485	6,72
Belanja Modal	280,484,000	279,897,540	0,21
Total Belanja Kotor	8,866,288,000	8,527,457,580	96,17
Pengembalian Belanja	-	555,075	-
Total Belanja	8,866,288,000	8,526,902,505	96,17

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,22% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Belanja Pegawai	3,554,559,480	2,994,139,450	15.77
Belanja Barang	4,692,445,485	5,072,252,874	(8.09)
Belanja Modal	279,897,540	36,000,000	87.14
Total Belanja	8,526,902,505	8,102,392,324	4.98

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,555,114,555 dan Rp. 2,994,139,450. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 15.77% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya beberapa pegawai yang naik pangkat
2. Adanya pegawai baru baik itu PPPK dan CPNS

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,977,992,431	2,834,829,622	4.81
Belanja Lembur	187,398,000	159,311,000	14.99
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	389,724,124	-	
Jumlah Belanja Kotor	3,555,114,555	2,994,140,622	15.78
Pengembalian Belanja Pegawai	555,075	1,172	99.79
Jumlah Belanja	3,554,559,480	2,994,139,450	15.77

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4,692,445,485 dan Rp.5,072,252,874 . Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar -8,09% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan adanya revisi anggaran pada awal tahun

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,191,313,129	1,401,230,188	-17,62
Belanja Barang Non Operasional	1,044,168,880	1,597,834,808	-53,02
Belanja Barang Persediaan	430,797,040	36,030,600	91,64
Belanja Jasa	404,351,051	421,894,826	-4,34
Belanja Pemeliharaan	1,219,681,604	924,886,292	24,17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	402,133,781	690,376,160	-71,68
Jumlah Belanja Kotor	4,692,445,485	5,072,252,874	-8,09
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja	4,692,445,485	5,072,252,874	-8,09

9 B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.279,897,540 dan Rp.36.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 87,14% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembelanjaan dari dana anggaran rutin dan PNBPN.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279,897,540	36.000.000	87,14
Jumlah Belanja Kotor	279,897,540	36.000.000	87,14
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	279,897,540	36.000.000	87,14

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.279,897,540 dan Rp.36,000,000 . Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 23,84% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya penambahan anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran berjalan.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279,897,540	36.000.000	87,14
Jumlah Belanja Kotor	279,897,540	36.000.000	87,14
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	279,897,540	36.000.000	87,14

Rincian Belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 602,485,500 dan Rp.336,897,000 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	592,500	828,000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	601,893,000	327,969,000
Persediaan Lainnya	-	8,100,000
Jumlah	602,485,500	336,897,000

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15,124,896,000 dan Rp.15,124,896,000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.11,104,274,766 dan Rp.10,824,377,226 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	10,824,377,226
Mutasi Tambah	
Pembelian	279,897,540
Mutasi Kurang	
Penghapusan Aset	-

Saldo per 31 Desember 2025	11.104.274.766
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	10,708.361.880
Nilai Buku per 31 Desember 2025	395.912.886

- Mutasi penambahan berupa pembelian belanja modal berupa:

No	Nama Barang	Satuan	Nilai
1	Analytical Balance (Neraca Analitik)	1 unit	8,500,000
2	Lemari Besi/Metal	1 unit	2,400,000
3	CCTV - Camera Control Television System	2 unit	25,400,000
4	Kursi Besi/Metal	14 unit	20,360,000
5	Sofa	1 set	19,500,000
6	Lemari Es	1 unit	5,757,000
7	A.C. Split	3 unit	34,465,500
8	Dispenser	1 unit	2,650,000
9	Camera Conference	2 unit	35,100,000
10	Personal Computer	1 unit	21,450,000
11	Rice (Alat Laboratorium Pertanian)	1 unit	17,800,000
12	Anak Timbangan	4 unit	18,899,040
13	Laptop	2 unit	47,866,000
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	4,500,000
15	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	15,250,000
Jumlah			279,897,540

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15,475,031,427 dan Rp.15,475,031,427 Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	15,475,031,427
Mutasi Tambah	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	15,475,031,427
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	3,325,750,289

Nilai Buku per 31 Desember 2025	12,149,281,138
---------------------------------	----------------

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.758,963,330 dan Rp. 758,963,330,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	758,963,330
Mutasi Tambah	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	758,963,330
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	367,470,282
Nilai Buku per 31 Desember 2025	391,493,048

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 55,000,000 dan Rp.55,000,000,-

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-14,401,582,451 dan Rp.-13,857,093,483,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	15,124,896,000	0	15,124,896,000
2.	Peralatan dan Mesin	11,104,274,766	10,708.361.880	395,912.,886
3.	Gedung dan Bangunan	15,475,031,427	3,325,750,289	12,149,281,138
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	758,963,330	367,470,282	391,493,048

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
5.	Aset Tetap Lainnya	55,000,000	25,283,703	-
Akumulasi Penyusutan		42,272,622,483	14,401,582,451	27,665,670,186

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.45.199.040 dan Rp.0. Dana yang dibatasi penggunaannya adalah kas atau setara kas yang disisihkan dan alokasinya khusus untuk tujuan tertentu, tidak dapat digunakan langsung untuk operasional umum, dan sering kali disimpan dalam rekening terpisah. Dana ini mencakup jaminan, dana cadangan, atau dana hibah yang penggunaannya diatur kontrak yang di miliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten berupa Belanja Modal.

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.31,900,000 dan Rp.31,900,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	31,900,000
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang	
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-
Saldo per 31 Desember 2025	31,900,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	25,283,703
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6.616.297

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-25,283,703,- dan Rp.-23,629,629,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	31,900,000	25,283,703	6,616,297
Akumulasi Penyusutan		31,900,000	25,283,703	6,616,297

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45,199,040 dan Rp0.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan SPM RPATA berupa Belanja Modal yang SP2D nya terbit di tahun berikutnya (tahun 2026) Belanja tersebut merupakan pengadaan laboratorium dari kegiatan PNBPN.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.29,725,684,869 dan Rp.28,726,341,871. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.622,181,100 dan Rp. 387,113,000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budaya	598,100,600	373,666,000	37,52
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	7,000,000	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	18,655,500	-	-
Pendapatan dari hasil penjualan peralatan dan mesin	-	6,851,000	-
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	5,425,000	0	-
Jumlah	622,181,100	387,113,000	37.72

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3,554,559,480 dan Rp.2,994,139,450 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,055,783,180	2,008,090,000	2.32
Beban Pembulatan Gaji PNS	32,225	31,567	2.04
Beban Tunj. Anak PNS	51,832,411	49,783,168	3.95
Beban Tunj. Beras PNS	118,768,800	113,699,400	4.27
Beban Tunj. Fungsional PNS	224,040,000	223,780,000	0.12
Beban Tunj. PPh PNS	21,731,486	21,957,705	(1.04)
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	137,930,254	133,666,610	3.09
Beban Tunjangan Umum PNS	40,945,000	33,250,000	18.79
Beban Uang Lembur	176,756,000	159,311,000	9.87
Beban Uang Makan PNS	301,174,000	225,370,000	25.17
Beban Gaji Pokok PPPK	254,232,967	-	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,037	-	100.00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	22,890,866	-	100.00
Beban Tunjangan Anak PPPK	7,582,466	-	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,203,333	-	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	24,218,455	-	100.00
Beban Uang Makan PPPK	60,224,000	-	100.00
Jumlah	3,554,181,480	2,994,139,450	15.76

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp418,712,540 dan Rp36,008,600. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	375,546,540	35,202,600	90.63
Beban Persediaan Lainnya	43,166,000	806,000	98.13
Jumlah	418,712,540	36,008,600	91,40

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,639,833,060 dan Rp3,420,959,822. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Bahan	536,544,880	1,241,434,036	(131.38)
Beban Penamah Daya Tahan Tubuh	328,500	-	100.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	508,290,000	360,660,772	29.04
Beban Barang Operasional Lainnya	72,170,000	136,450,000	(89.07)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70,080,000	66,012,000	5.80
Beban Sewa	39,700,000	78,325,000	(97.29)
Beban Jasa Lainnya	42,876,457	58,290,000	(35.95)
Beban Jasa Profesi	42,150,000	44,200,000	(4.86)
Beban Keperluan Perkantoran	1,048,734,629	1,194,508,188	(13.90)
Beban Langganan Listrik	275,159,967	237,161,205	13.81
Beban Langganan Telepon	3,798,627	3,918,621	(3.16)
Jumlah	2,639,833,060	3,420,959,822	(25.59)

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,219,681,604 dan Rp924,886,292. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	869,585,322	573,813,525	34.01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350,096,282	351,072,767	(0.28)
Jumlah	1,219,681,604	924,886,292	24.17

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp402,133,781 dan Rp. 690,376,160. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	266,583,781	500,806,160	(87.86)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	135,550,000	189,570,000	(39.85)
Jumlah	402,133,781	690,376,160	(71.68)

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1,051,953,990 dan Rp.196,479,325. Beban tersebut adalah

merupakan beban yang terjadi untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,051,953,990	196,479,325	81.32
Jumlah	1,051,953,990	196,479,325	81.32

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 546,143,042 dan Rp.589,720,324. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	391,404,495	391,404,496	-
Beban Penyusutan Irigasi	10,436,056	10,439,056	(900.34)
Beban Penyusutan Jaringan	7,320,891	10,300,278	(40.70)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,654,074	1,654,074	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	135,327,526	175,925,420	-
Jumlah	546,143,042	589,720,324	(7.89)

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp.(9,210,836,397) dan Rp. (8,465,456,973)

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	641,061,746	-
Jumlah	-	641,061,746	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 28,726,341,871 dan Rp. 28,943,165,195

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.8,023,017,607 dan Rp.7,817,544,227 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.112,527,000 dan Rp.35,074,825

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 112,527,000 dan Rp 35,074,825.

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 7,909,833,605 dan Rp. 7,565,646,078. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,526,902,505
Diterima dari Entitas Lain	(622,181,100)
Transfer Masuk	(5,112,200)
Jumlah	7,909,833,605

E.4.1. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp28,725,684,869 dan Rp28,726,341,871.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Penjelasan mengenai hal-hal penting lainnya

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Kementerian/Lembaga : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31 Des 2025	Sisa Pagu s.d. 31 Des 2025	Rencana Realisasi	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B – F)
51	3,555,370,000	3,554,559,480	810,520	-	-	-
52	5,030,434,000	4,692,445,485	337,988,515	-	-	-
53	280,484,000	279,897,540	586,460	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-
Total	8,866,288,000	8,526,902,505	339,385,495	-	-	-

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Kementerian/Lembaga : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 31- Des - 2025	Rencana Realisasi	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (D + E)	G (C – F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,555,370,000	3,554,559,480	-	-	-
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	-	-	-	-	-
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	-	-	-
5114	Belanja Gaji Dokter PTT	-	-	-	-	-
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-	-	-	-	-
5121	Belanja Honorarium	-	-	-	-	-
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-	-	-

Sampai dengan tahun 2025, tidak terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai.

c. Informasi Pagu Blokir

Kementerian/Lembaga : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Blokir Pagu (Rp)	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51	3,555,370,000	-	-	-
2	52	5,030,434,000	334,090,000	-	-
3	53	280,484,000	-	-	-

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp 334,090,000 Sampai dengan tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp - sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp. - (Satuan Kerja kurang mengetahui kapan adanya pembukaan blokir).

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

a. Informasi Outstanding Kontrak

Kementerian/Lembaga: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

No.	Eselon I	Jumlah Kontrak	Nilai Total Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Sampai dengan tahun 2025, tidak terdapat kontrak yang masih outstanding.

b. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

Kementerian/Lembaga: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

No.	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan tahun 2025, tidak terdapat kontrak yang masih outstanding.

3. Informasi Progres Likuidasi K/L pada Kabinet Merah Putih

a. Progres Likuidasi Berdasarkan Jumlah Satker

Kementerian/Lembaga: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

Jumlah satker Terlikuidasi	Selesai Likuidasi	Dalam Proses	% Progres Penyelesaian
-	-	-	-

b. Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset dan Kewajiban
Kementerian/Lembaga: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten

Pos Neraca	Nilai Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Nilai Saldo 30 Desember 2025	Mutasi	% Progres Likuidasi
A	B	C	D (B - C)	E (D / B x 100%)
Aset				
- Aset Lancar	-	-	-	-
- Aset Tetap	-	-	-	-
- Properti Investasi	-	-	-	-
- Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
- Aset Lainnya	-	-	-	-
Kewajiban				
- Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-
- Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-

Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten tidak melakukan Likuidasi.

B. Informasi Penting Lainnya

3. Kondisi

Penjelasan informasi mengenai kondisi dapat meliputi reorganisasi, pergantian pimpinan, kepemilikan aset seperti melimpahkan atau menerima aset hasil likuidasi, dan lain sebagainya.

3. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Penjelasan informasi mengenai Hal Khusus Menyangkut Program Strategis memuat penjelasan program strategis yang meliputi penjelasan atas target dan capaian secara ringkas. Misalnya Badan Gizi Nasional menjelaskan program Makanan Bergizi Gratis, Kementerian Koperasi menjelaskan program Koperasi Merah Putih, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan program Sekolah Garuda.

3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L

Memuat keterangan dan penjelasan akun-akun yang signifikan baik LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pemilihan akun signifikan tersebut mempertimbangkan rasio persentase akun terkait dengan total pendapatan/belanja/aset/kewajiban/beban pada setiap komponen laporan keuangan, akun yang khusus pada K/L tersebut, dan pertimbangan kebutuhan manajerial lainnya untuk diuraikan lebih lanjut. Misalnya Kementerian Keuangan menjelaskan akun pendapatan perpajakan, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan akun belanja modal (infrastruktur) dan akun aset, atau Kementerian Sosial menjelaskan akun belanja sosial. Penyusunan informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya sebagaimana poin A dan B pada Entitas Akuntansi di bawah K/L dapat disesuaikan dengan kebutuhan Entitas Pelaporan.

**Penyajian Data Anggaran, Realisasi
Anggaran, Target Dan Realisasi Rincian
Output Berdasarkan Fungsi APBN Dan
Prioritas Nasional Tahun 2025 Pada Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun
2025**

INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian

Fungsi : Ekonomi

Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018.09.EC.7911.AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	138.431.000	138.431.000	100	347	347	Orang	100	
018.09.EC.7911.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	30.000.000	30.000.000	100	1	1	Lembaga	100	
018.09.EC.7911.CAG.105	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	280.484.000	279.897.540	99,79	2	2	Unit	100	
018.09.HA.7912.RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	896.300.000	895.647.797	99,93	50	50	Unit	100	
018.09.WA.6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000.000	588.527.481	66,13	1	1	Kegiatan	100	Pagu Efektif Rp.590.000.000
018.09.WA.6918.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	9.660.500	96,61	1	1	Layanan	100	Pagu Efektif Rp. 9.700.000
018.09.WA.6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	9.800.000	8.496.700	86,70	1	1	Layanan	100	Pagu Efektif Rp.8.510.000
018.09.WA.6918.EBA.962	Layanan Umum	156.900.000	127.325.000	81,15	1	1	Layanan	100	Pagu Efektif Rp.127.720.000
018.09.WA.6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.426.073.000	6.424.627.662	99,98	1	1	Layanan	100	

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
018.09.WA.6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28.300.000	24.844.000	87,79	1	1	Layanan	100	Pagu Efektif Rp.24.980.000

***Keterangan: Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam laporan keuangan**

A. Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Prioritas Nasional 03 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

4. Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

5. Prioritas Nasional 05 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - Standardisasi dan Penilaian Keseuaian Bidang Pertanian		-	-	Orang		0	-
Program Dukungan Manajemen - Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian				Layanan			

7. Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

8. Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-